

# **TESIS**

#### Judul:

Kebijakan Penambahan Prasyarat Kartu Bpjs Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Kepastian Hukum

## Disusun oleh:

TEGUH ARIYANTO NIM. 217212048

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA 2024

## Kebijakan Penambahan Prasyarat Kartu Bpjs Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Kepastian Hukum

## **TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

> **Disusun oleh:** TEGUH ARIYANTO NIM. 217212048

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA 2024

## Pengesahan

Nama

: TEGUH ARIYANTO

NIM

: 217212048

Program Studi

: MAGISTER KENOTARIATAN

Judul Tesis

: KEBIJAKAN PENAMBAHAN PRASYARAT KARTU BPJS DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF

KEPASTIAN HUKUM

Title

: LEGAL CERTAINTY OF BPJS KESEHATAN CARD REQUIREMENTS IN THE TRANSFER

OF LAND RIGHTS

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 23- Januari-2024.

Tim Penguji:

- 1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
- 2. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,,MH., Dr.
- 3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: LULUS.

Pembimbing:

GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,,MH.,

Dr

NIK/NIP: 10288010

Jakarta, 23-Januari-2024

Ketua Program Studi

MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

## Persetujuan

Nama

: TEGUH ARIYANTO

NIM

: 217212048

Program Studi

: MAGISTER KENOTARIATAN

Judul

: KEBIJAKAN PENAMBAHAN PRASYARAT KARTU BPJS DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN

HUKUM

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 20-Januari-2024

Pembimbing: GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,,MH.,

NIKNIP: 10288010

#### **ABSTRAK**

(A) Nama : Teguh Ariyanto (NIM. 217212048)

(B) Judul Tesis : "KEBIJAKAN PENAMBAHAN PRASYARAT KARTU BPJS DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM".

(C) Halaman : ix + 155 + 2024

(D) Kata Kunci : Inpres, Pertanahan, BPJS

(E) Isi :

Problematika substansial Inpres No. 1/2022 yang telah mencampuradukkan antara dua lingkup peraturan yang berbeda yaitu antara pengaturan pendaftaran tanah dengan pengaturan urusan program jaminan nasional. Dengan diterbitkannya Inpres No. 1/2022 telah memperumit urusan masyarakat dalam upaya memperoleh perlindungan hukum yang pasti atas kepemilikan hak atas tanah. Selain itu, Inpres No. 1/2022 sama sekali tidak sinkron dengan PP. No. 24/1997. Sehingga, Presiden dalam mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional benar-benar tidak mengaktualisasikan asas kepastian hukum karena justru memperumit masyarakat dalam urusan pendaftaran tanah.Inpres No. 1/2022 tidak sinkron dengan UU No. 5/1960. Secara legalistik formal, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 5/1960, untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Artinya, berkaitan dengan makanisme pendaftaran tanah beserta persyaratannya pengaturannya hanya dapat dilakukan lewat peraturan pemerintah, sehingga penambahan persyaratan pendaftaran peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan lewat Instruksi Presiden karena tidak memenuhi ketentuan formil. Secara substansi, Inpres No. 1/2022 memberikan syarat baru yaitu keharusan pemohon pendaftaran tanah karena jual beli harus berstatus sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional, hal mana persyaratan ini bertujuan sebagai cara untuk melakukan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Persyaratan tersebut sama sekali tidak koheren dengan urusan pendaftaran peralihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1960 dengan aturan pelaksananya. Selain itu juga berbenturan dengan asas pendaftaran tanah yang harus dilakukan secara sederhana dan terjangkau. Sehingga pemerintah tidak mengaktualisasikan aspek kepastian hukum dimana peraturan hukum harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

(F) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H.,S.S.,M.H

(G) Penulis : Teguh Ariyanto

#### **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul "KEBIJAKAN PENAMBAHAN PRASYARAT KARTU BPJS DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM", yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan dengan segala hormat kepada:

- Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, beserta para Wakil Dekan.
- 2. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H.,S.S.,M.H., selaku dosen pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan nasihat yang mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan baik.
- 3. Teristimewa kepada istri tercinta, anak-anak saya tercinta (Berland, Ramdyna, Tyger, Infantri) dan kerabat-kerabat penulis yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat yang besar, tiada henti dan berharga bagi penulis;
- 4. Semua dosen Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan kenotariatan, beserta semua staf yang telah membantu penulis dalam urusan administratif.
- Teman Kuliah, Ahmad Jakariya Ansori, Liha Solihatun Nisa, Wulan Agustini dan Riwenda Septiani yang mendampingi Penulis sejak awal masuk kuliah sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini;
- 6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala budi baik semua pihak yang telah membantu penulis dalam pengerjaan Tesis ini. Penulis berharap Tesis ini dapat memberikan wawasan baru dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada sehingga dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca.

Jakarta, 10 Juli 2023

Teguh Ariyanto

### Pernyataan

Nama NIM

TEGUH ARIYANTO

217212046

Program Studi

MAGISTER KENOTARIATAN

Judul

KEBUAKAN PENAMBAHAN PRASYARAT KARTU BPJS DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pemyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesual aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20-Januari-2024 Yang menyatakan

TEGUH ARIYANTO NIM. 217212048

### **DAFTAR ISI**

HALAN	MAN JUDUL		
COVER	DALAM	i	
PENGE	SAHAN	ii	
PERSE	ΓUJUAN	iii	
ABSTR	AK	iv	
KATA I	PENGANTAR	v	
PERNY	ATAAN	vii	
DAFTA	R ISI	viii	
DAFTA	R LAMPIRAN	ix	
BAB I	PENDAHULUAN	1	
	A. Latar Belakang	1	
	B. Permasalahan	9	
	C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9	
	D. Kerangka Teoritis	11	
	E. Metode Penelitian	15	
	F. Sistematika Penulisan	20	
BAB II	LANDASAN TEORI	22	
	A. Negara Hukum	22	
	B. Konsep Kepastian Hukum	36	
	C. Konsep Hierarki Norma Hukum	51	
	D. Peraturan Perundang-undangan	69	
	E. Hak Atas Tanah	78	
	F. Konsep Keadilan	101	
BAB III	DATA DAN HASIL PENELITIAN	110	
A. 1	Intruksi Presiden No.1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan		
]	Program Jaminan Kesehatan Nasional	110	
В. 1	Ruang Lingkup Pemberlakuan Intruksi Presiden	114	
C. Dasar Hukum BPJS Kesehatan			

D. Pe	eraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran			
Tanah				
BAB IV	KEBIJAKAN PENAMBAHAN PRASYARAT KARTU BPJS			
	DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM			
	PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM	128		
	A. Kebijakan Penambahan Prasyarat Kartu BPJS Untuk Peralihan			
	Hak Atas Tanah Sudah Sesuai Dengan Prinsip Peralihan Hak			
	Atas Tanah	128		
	B. Relevansi BPJS terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Terhadap			
	Prinsip Kepastian Hukum	142		
BAB V	PENUTUP	154		
	A. Kesimpulan	154		
	B. Saran	155		
DAFTRA PUSTAKA				
LAMPIR	AN			

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Surat Tugas Bimbingan
Lampiran 3	Berita Acara Bimbingan Tesis
Lampiran 4	Surat Keterangan Turnutun
Lampiran 5	Hasil Turnitin
Lampiran 6	Letter of Acceptance (LoA)
Lampiran 7	Jurnal Publikasi